



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DERMAWAN S. DJAMIAN**
2. Jabatan : **HAKIM AD-HOC**
3. NHK : **654088**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.964.340.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/150 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/100 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 864.340.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 685.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CROWN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 614.821.281**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.269.161.281



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.269.161.281

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.